

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA PELAYANAN
PUBLIK DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BULELENG

Komang Kappa Tri Aryandono, Komang Krisna Heryanda, Ni Luh Wayan Sayang Telagawathi
Universitas Pendidikan Ganesha

ARTICLE INFO

Keywords:

Public Services, National Unity Body and Politics, Principles of Good Governance

Kata Kunci:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Pelayanan Publik, Prinsip *Good Governance*

Corresponding author:

Komang Kappa Tri Aryandono

Kappa@student_undiksha.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the application of good governance principles and develop development strategies to increase the implementation of good governance in public services at the National Unity and Political Agency of Buleleng Regency. The research location is the National Unity and Politics Agency of Buleleng Regency. The subjects in this research were 60 mass organizations. The object of this research is the principles of good governance, public services, National Unity and Politics. The sample in the research used census techniques, namely: 60 officially registered mass organizations and all of them were used as research respondents and 4 elements of public service management. The data collection technique uses questionnaires and interviews which are filled in via Google Form. Data analysis techniques use descriptive analysis and SWOT. The research results show the factors that influence the implementation of good governance: human resources have carried out their duties well, but attention needs to be paid to the attitude of human resources in serving the community and needs to be improved. Community participation has been good in every activity, and the desire to participate and convey aspirations has not been closed*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *good governance* serta menyusun strategi pengembangan untuk peningkatan penerapan *good governance* pada pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Lokasi penelitian yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Subjek dalam penelitian ini 60 ormas. Objek penelitian ini prinsip *good governance*, pelayanan publik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sampel pada penelitian menggunakan teknik sensus yaitu: 60 ormas yang resmi terdaftar dan seluruhnya dijadikan responden penelitian dan 4 unsur pengelola pelayanan publik. Teknik pengambilan data menggunakan metode kuisioner dan wawancara yang diisi melalui *Google Form*. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *good governance*: sumber daya manusia sudah melaksanakan tugas dengan baik namun perlu di perhatikan sikap sumber daya manusia dalam melayani masyarakat serta perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat sudah baik dalam setiap kegiatan, serta tidak menutup keinginan berpartisipasi, menyampaikan aspirasi.

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan syarat berjalannya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi, tuntutan atas pengelolaan pemerintah yang baik semakin meningkat pula. Perubahan segala tatanan kehidupan kenegaraan dituntut di era reformasi. Birokrasi saat ini Indonesia belum berhasil secara maksimal dalam menjalankan tugas dan peran yang baik karena birokrasi tidak hanya mengutamakan kemampuan menyelesaikan tugas dan bertindak saja, namun harus peka terhadap aspirasi masyarakat dan mampu melahirkan ide-ide baru memudahkan operasional organisasi. Namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pelayanan Publik, Prinsip *Good Governance* untuk menjadikan birokrasi Indonesia *good governance* diterapkan untuk membantu sistem birokrasi. Di Indonesia, konsep *good governance* digunakan dalam memberikan inovasi dan perbaikan pada sistem birokrasi sekarang. Jika praktik *good governance* baik maka kualitas pelayanan pemerintah akan baik, angka korupsi semakin rendah, pemerintah semakin peduli dengan kepentingan rakyat dan akhirnya kesejahteraan semakin meningkat (Putra, 2013). Maka dibutuhkan sebuah langkah strategis untuk memulai perbaikan praktik pemerintahan. Langkah realisasi *good governance* akan lebih mudah diterapkan jika dimulai dari sektor pembaharuan pelayanan publik, karena menerapkan nilai-nilai *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam praktek pelayanan publik relatif mudah daripada melembagakan keseluruhan nilai-nilai tersebut dalam aspek kegiatan pemerintahan (Syam, 2020).

Fenomena pelayanan publik aparatur administrasi negara penuh permasalahan dan masih ada kendala, seperti prosedur pelayanan terkesan panjang, ketidakpastian waktu dan biaya membuat layanan ini sulit diakses oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak ada kepercayaan terhadap penyedia layanan, sehingga masyarakat mencari cara lain untuk memperoleh pelayanan melalui cara-cara tertentu. Masyarakat membutuhkan bantuan birokrat sehingga harus mematuhi peraturan birokrasi dan kemauan para pejabatnya. Hal ini terjadi karena budaya birokrasi yang berkembang selama ini bukanlah suatu pelayanan melainkan suatu arah ke depan budaya kekuasaan (Tawai et al., 2023). Berdasarkan data laporan pengaduan di Ombudsman selaku lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2021 terkait mal-administrasi yang paling dominan adalah penundaan berlarut, kemudian penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, tidak patut dan berpihak.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan. Standar tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolok ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan. Disana diuji keterpenuhan pelaksanaan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat perihal layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2023 bahwa tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik (Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023-2026, 2023). Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut, dalam perkembangan kehidupan masyarakat, globalisasi dan tuntutan perkembangan teknologi, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sangat berdampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti pula bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sangat berdampak dalam memberikan pelayanan publik.

Menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan

terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menetapkan Keputusan Kepala Badan Nomor: 000.8.3.2/2524/IX/BKBP/2023 tentang Standar Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Buleleng ditujukan kepada organisasi kemasyarakata (ormas). Dari hasil catatn Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng terdaftar 60 ormas. Berdasarkan Laporan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 bahwa Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng diketahui adalah sebesar 56,89 pada opini kualitas “sedang” (interval nilai 54,00 –77,99) berada di zona kuning. Hal ini menunjukkan implementasi *good governance* belum terlaksana secara maksimal dan penerapan prinsip *good governance* masih belum berjalan dengan baik pada pelayan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2006). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional. Penelitian digunakan untuk melihat gambaran dari fenomena, deskripsi kegiatan dilakukan secara sistematis dan lebih menekankan pada data faktual dari pada penyimpulan (Nursalam, 2013). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel yaitu 60 ormas yang resmi terdaftar dan seluruhnya dijadikan responden penelitian dan 4 unsur pengelola pelayanan publik. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif serta analisis SWOT digunakan untuk memperoleh gambaran penerapan prinsip *good governance* pada pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 3.1 Karakteristik Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin:			
1	Laki-Laki	48	80%
	Perempuan	12	20%
	Total	60	100%
Usia:			
2	21 – 30 Tahun	8	13,3%
	31 – 40 Tahun	8	13,3%
	41 – 50 Tahun	20	33,4%
	> 50 Tahun	24	40%
	Total	60	100%

Pendidikan:			
3	SMA/SMK	25	42%
	Diploma	18	30%
	Sarjana	14	23%
	Magister (S2)	3	5%
	Total	60	100%

Sumber: Data diolah (2023)

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin merupakan sebagai indikator untuk mengetahui jumlah responden seorang laki-laki atau perempuan. Pada Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa dari total 60 responden penelitian, sebesar 80% merupakan responden laki-laki. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 20% merupakan responden perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih dominan dibandingkan responden perempuan.
2. Karakteristik responden berdasarkan usia digunakan untuk menentukan rentang usia responden baik pada tingkat kelompok usia produktif maupun lanjut usia. Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh hasil bahwa responden yang berpartisipasi pada penelitian ini terbanyak berusia lebih dari 50 tahun sebesar 40%. Sedangkan, responden berusia 21-30 dan 31-40 tahun menunjukkan jumlah yang paling sedikit yaitu sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa responden adalah kelompok lanjut usia.
3. Karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan akhir responden dapat dilihat dari Tabel 3.1 responden yang telah menempuh jenjang pendidikan terakhirnya di SMA/SMK menunjukkan nilai skor tertinggi yaitu sebesar 42%. Sedangkan, responden yang telah menempuh jenjang pendidikan terakhirnya di Magister (S2) menunjukkan nilai skor terendah yaitu sebesar 5%.

Uji Validitas

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlaition	r - table	Keterangan
1	<i>Strength</i>	S _{1.1}	0,356	0,312	Valid
		S _{1.2}	0,442	0,312	Valid
		S _{1.3}	0,591	0,312	Valid
		S _{1.4}	0,755	0,312	Valid
		S _{1.5}	0,624	0,312	Valid
2	<i>Weakness</i>	W _{2.1}	0,531	0,312	Valid
		W _{2.2}	0,674	0,312	Valid
		W _{2.3}	0,614	0,312	Valid
		W _{2.4}	0,736	0,312	Valid
		W _{2.5}	0,714	0,312	Valid
3	<i>Opportunity</i>	O _{3.1}	0,496	0,312	Valid
		O _{3.2}	0,384	0,312	Valid
		O _{3.3}	0,752	0,312	Valid
		O _{3.4}	0,755	0,312	Valid
		O _{3.5}	0,700	0,312	Valid
4	<i>Threats</i>	T _{4.1}	0,764	0,312	Valid
		T _{4.2}	0,424	0,312	Valid
		T _{4.3}	0,765	0,312	Valid

T _{4.4}	0,672	0,312	Valid
T _{4.5}	0,780	0,312	Valid

Sumber: Data primer diolah (2023)

Tabel 3.2 menendeskripsikan bahwa semua indikator pada analisis SWOT adalah asli karena mempunyai nilai r tabel lebih besar dari r hitung, yaitu 0,312.

Uji Reliabilitas

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Item Pertanyaan	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	<i>Strength</i>	S _{1.1}	0,911	Reliabel
		S _{1.2}	0,910	Reliabel
		S _{1.3}	0,904	Reliabel
		S _{1.4}	0,897	Reliabel
		S _{1.5}	0,902	Reliabel
2	<i>Weakness</i>	W _{2.1}	0,904	Reliabel
		W _{2.2}	0,900	Reliabel
		W _{2.3}	0,901	Reliabel
		W _{2.4}	0,898	Reliabel
		W _{2.5}	0,899	Reliabel
3	<i>Opportunity</i>	O _{3.1}	0,904	Reliabel
		O _{3.2}	0,907	Reliabel
		O _{3.3}	0,899	Reliabel
		O _{3.4}	0,897	Reliabel
		O _{3.5}	0,899	Reliabel
4	<i>Threats</i>	T _{4.1}	0,899	Reliabel
		T _{4.2}	0,905	Reliabel
		T _{4.3}	0,898	Reliabel
		T _{4.4}	0,900	Reliabel
		T _{4.5}	0,898	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan uji reliabilitas instrumen pada Tabel 3.3, diperoleh setiap analisis SWOT dapat dinyatakan dapat dipercaya karena setiap poin memperoleh nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,60.

Hasil Analisis Faktor Strategis Internal dan Eksternal

Berapapun faktor internal yang dipertimbangkan, baik itu kekuatan maupun kelemahan, total nilai tertimbang yang dihasilkan akan berkisar dari 1,0 untuk yang sangat rendah sampai 4,0 untuk yang sangat tinggi, dengan skor rata-ratanya 2,5. Dengan demikian, jika dari hasil matriks IFAS ditemukan bahwa hasil yang diperoleh dibawah 2,5 berarti kondisi internal organisasi dalam sebaliknya, jika hasilnya lebih dari 2,5 dapat disampaikan, posisi internal organisasi relatif kuat untuk mengetahui lebih jelas jawaban yang menyangkut faktor internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 IFAS (*Internal Strategic Analysis Summary*)

FAKTOR STRATEGI INTERNAL	Bobot	Ranking	Rata-Rata
<i>STRENGTH</i>			
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng memiliki jumlah SDM yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	0,20	3,75	0,75
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng berperan aktif memberikan pelayanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat	0,20	3,78	0,76
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng memiliki akuntabilitas dan transparansi keuangan yang baik dan berdampak pada efektifitas pelayanan publik	0,20	3,8	0,76
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng memiliki peralatan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik	0,20	3,7	0,74
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng memiliki standar operasional prosedur yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan pelayanan publik	0,20	3,75	0,75
<i>TOTAL STRENGTHS</i>			3,76
<i>WEAKNESS</i>			
Kurangnya SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang berkompeten dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	0,19	1,7	0,32
Kurang maksimalnya pelayananan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat	0,20	1,75	0,35
Keterbatasan anggaran berdampak pada pengembangan pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Buleleng	0,21	1,86	0,39
Kurangnya aksesibilitas infrastruktur fisik berdampak pada pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	0,20	1,95	0,39
Belum terintegrasinya sistem administrasi pelayanan publik menyebabkan proses birokrasi yang masih panjang pada pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	0,20	1,83	0,37
<i>TOTAL WEAKNESS</i>			1,81
TOTAL IFAS			5,58

Sumber: Data primer diolah (2023)

Pada Tabel 3.4 di atas dapat dilihat nilai total dari nilai matriks IFAS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng adalah 5,58 nilai ini menunjukkan bahwa dalam usahanya menjalankan strategi menunjukkan bahwa organisasi berada pada posisi di atas rata-rata dalam hal kekuatan internal secara keseluruhan yang terkait dengan faktor manusia pelaksana (man), faktor partisipasi masyarakat, faktor keuangan, faktor peralatan, faktor organisasi dan manajemen.

Demikian pula dengan matriks EFAS, jika dari hasil EFAS matriks ditemukan bahwa hasil yang diperoleh dibawah 2,5 berarti organisasi dengan keadaan yang ada belum mampu memanfaatkan peluang secara optimal dan sangat rentan terhadap ancaman persaingan. Artinya, dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal, organisasi dalam posisi lemah sebaliknya, jika hasilnya lebih dari 2,5 dapat disimpulkan, dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal posisi organisasi relatif kuat.

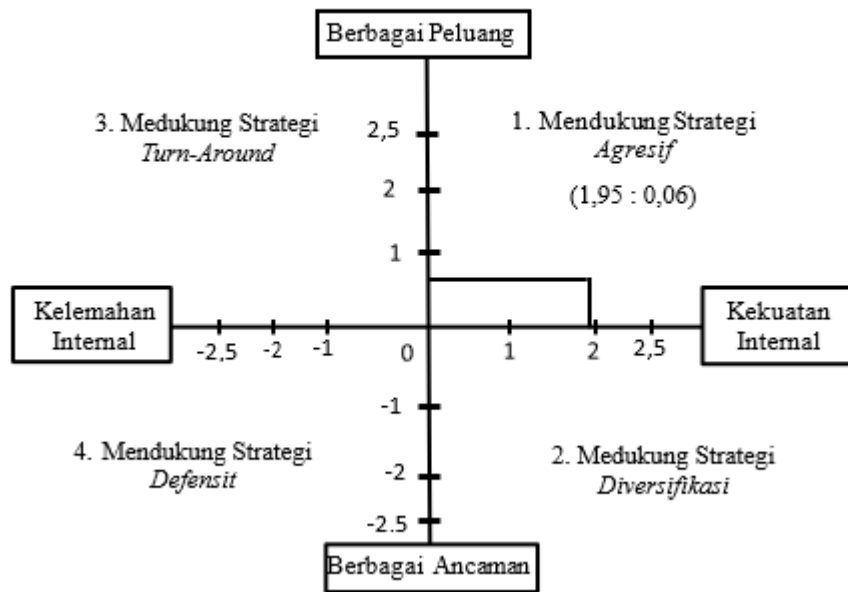
Tabel 3.5 EFAS (*Exsternal Factor Analisis Summary*)

FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	Bobot	Rating	Rata-rata
<i>OPPORTUNITIES</i>			
Tersedianya dukungan regulasi pengembangan kompetensi SDM pengelola pelayanan publik yang secara rutin dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	0,20	3,68	0,74
Kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menyebabkan dukungan masyarakat yang semakin besar terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas	0,20	3,78	0,76
Tersedianya dukungan regulasi yang mewajibkan pengelolaan anggaran untuk mendukung sektor pelayanan publik pada Masyarakat	0,20	3,8	0,76
Kemajuan teknologi informasi mempermudah akses pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng	0,20	3,75	0,75
Tersedianya dukungan kebijakan dan regulasi yang progresif dalam peningkatan pelayanan publik kepada Masyarakat	0,20	3,76	0,75
TOTAL <i>OPPORTUNITIES</i>			3,75
<i>THREAT</i>			
Perkembangan teknologi informasi menuntut peningkatan perubahan kebutuhan kompetensi SDM pengelola pelayanan publik	0,20	3,7	0,74
Perubahan paradigma dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng yang semakin tinggi	0,20	3,61	0,72
Penentuan kebijakan program prioritas anggaran mempengaruhi pengembangan	0,20	3,78	0,76

pelayanan publik pada masyarakat			
Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang berkualitas menuntut kebutuhan alokasi anggaran yang besar	0,20	3,66	0,73
Peningkatan kompetensi antara instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas	0,20	3,71	0,74
TOTAL THREAT			3,69
TOTAL EFAS			7,45

Sumber: Data primer diolah (2023)

Tabel 3.5 adalah matriks EFAS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dapat dilihat bahwa total dari nilai matriks EFAS yang dimiliki organisasi adalah 7.45. Hal ini menunjukkan strategi yang dijalankan organisasi secara efektif menggambarkan peluang eksternal yang ada dan menghindari pengaruh negatif potensial dari ancaman. Selanjutnya, perhitungan dilakukan pada Tabel 3.5 untuk mengetahui strategi paling tepat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng. Berdasarkan selisih tersebut ditentukan titik koordinat organisasi sebagaimana yang dilihat pada Gambar 3.1



Gambar 3.1 Diagram Analisis SWOT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng

Gambar 3.1 menjelaskan bahwa nilai skor untuk faktor kekuatan adalah sebesar 3.76 dan untuk faktor kelemahan sebesar 1,81 maka selisih dari nilai tersebut adalah sebesar 1,95 sedangkan nilai skor untuk faktor peluang adalah sebesar 3,75 nilai skor untuk faktor ancaman adalah sebesar 3,69 maka selisih dari nilai tersebut adalah sebesar 0,06. Nilai-nilai selisih tersebut dapat membentuk titik koordinat, yaitu (1,95 : 0,06). Sehingga didapatkan posisi organisasi berada pada kuadran 1 yang merupakan suatu situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Sehingga strategi yang tepat untuk diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*) Rangkuti (2003:19), sehingga hipotesis atau jawaban sementara sebagaimana yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat diterima.

Tabel 3.6 Matriks SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Treat*)

	STRENGTHS –S	WEAKNESSES –W
INTERNAL	1. Kuantitas SDM yang memadai 2. Peran aktif melibatkan partisipasi masyarakat 3. Akuntabilitas dan transparansi keuangan yang baik 4. Peralatan pelayanan yang memadai 5. Memiliki SOP yang efisien dan efektif	1. Masih kurangnya kompetensi SDM 2. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat 3. Keterbatasan anggaran di sektor pelayanan 4. Kurangnya aksesibilitas infrastruktur fisik 5. Belum terintegrasinya sistem pelayanan
EKSTERNAL		
	OPPORTUNITIES –O	WO
		SO
	1. Dukungan regulasi pengembangan kompetensi SDM 2. Kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang 3. Dukungan sistem penganggaran pemerintah 4. Kemajuan teknologi 5. Dukungan standar pelayanan minimal	1. Meningkatkan mutu tenaga informasi yang kurang optimal 2. Meningkatkan strategi pengenalan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada 3. Memperbanyak variasi pelayanan
		ST
		WT
	1. Perubahan kebijakan SDM 2. Paradigma masyarakat 3. Kebijakan prioritas anggaran 4. Modernisasi sarana prasarana 5. Kompetisi antar instansi pelayanan	1. Melakukan analisis jabatan dan keuangan yang baik 2. Meningkatkan daya saing instansi

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan *Good Governance*

Faktor Manusia (Man)

Berdasarkan hasil olah data, dapat diketahui tanggapan responden mengenai sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan tugas, sebanyak 55 orang responden atau 88% menyatakan baik dan 5 orang responden atau 12% menyatakan tidak baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sudah melaksanakan tugas dengan baik namun beberapa masukan dari responden perlu di perhatikan sikap sumber daya manusia dalam melayani masyarakat serta perlu ditingkatkan kembali.

Faktor Partisipasi Masyarakat

Dalam mengelola faktor partisipasi masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat merancang strategi untuk meningkatkan partisipasi, membangun keterlibatan yang inklusif, dan memitigasi potensi masalah yang terkait dengan rendahnya partisipasi atau ketidaksetaraan dalam keterlibatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan olah data, dari 60 responden Ormas dapat diketahui tanggapan responden mengenai partisipasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, sebanyak 47 orang responden atau 78,4% menyatakan baik, sebanyak 11 orang responden atau 18,3% menyatakan cukup baik dan 2 orang responden atau 3,3% menyatakan tidak baik. Dengan demikian kesimpulan sementara partisipasi masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sudah berpartisipasi dengan baik. Dengan demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng tidak menutup keinginan masyarakat untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi atau kepentingan mereka.

Faktor Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan olah data, dari 60 responden Ormas dapat diketahui tanggapan responden mengenai keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, sebanyak 52 orang responden atau 86,7 % menyatakan baik, sebanyak 6 orang responden atau 10 % menyatakan cukup baik dan 2 orang responden atau 3,3 % menyatakan tidak baik. Pemotongan anggaran sebagai ancaman utama dalam konteks keuangan adalah kemungkinan pemotongan anggaran. Pemotongan ini bisa berasal dari kebijakan pemerintah atau perubahan keadaan ekonomi yang merugikan. Fluktuasi ekonomi dapat menjadi ancaman karena dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan ketersediaan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam merancang strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, penting untuk mempertimbangkan bagaimana faktor keuangan ini dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan dan peluang, sementara kelemahan dan ancaman harus diatasi atau diminimalkan melalui perencanaan keuangan yang bijak. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sudah dengan baik namun beberapa masukan dari responden perlu transparansi dalam pembagian anggaran serta lebih transparan dalam prosesnya

Faktor Peralatan

Peningkatan teknologi dan peralatan baru: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melihat peluang untuk meningkatkan peralatan dan mengadopsi teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Ini bisa meliputi perbaruan perangkat lunak, pembaruan infrastruktur, atau pengenalan peralatan baru yang lebih efisien. Akan tetapi sarana yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng guna meningkatkan kualitas pelayanan masih kurang optimal seperti meja kerja, kursi kerja dalam kenyamanan pegawai saat bekerja dan masyarakat memperoleh layanan, fasilitas internet sering trouble di ruang tunggu dan komputer yang kurang memadai. Berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan olah data, dari 60 responden Ormas dapat diketahui tanggapan responden mengenai partisipasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, sebanyak 46 orang responden atau 77% menyatakan baik, sebanyak 10 orang responden atau 17% menyatakan cukup baik dan 4 orang responden atau 6% menyatakan tidak baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap peralatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sudah memadai.

Faktor Organisasi dan Manajemen

Dalam menganalisis faktor organisasi dan manajemen dalam SWOT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, penting untuk mengidentifikasi cara meningkatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengelola ancaman. Hal ini dapat melibatkan perencanaan strategis, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kapasitas organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan olah data, dari 60 responden Ormas dapat diketahui tanggapan responden mengenai organisasi dan manajemen di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, sebanyak 48 orang responden atau 80% menyatakan baik, sebanyak 10 orang responden atau 15,7% menyatakan cukup baik dan 2 orang responden atau 3,3 % menyatakan tidak

baik. Dengan demikian kesimpulan sementara terhadap organisasi dan manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sudah baik.

Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Penerapan Prinsip Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng tentang transparansi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, beliau mengatakan bahwa:

“Saya menegaskan komitmen terhadap prinsip transparansi sebagai nilai inti dalam menjalankan pemerintahan dan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Program transparansi inisiatif-inisiatif atau program-program yang telah diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, seperti penyediaan informasi terbuka, publikasi laporan, atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imantari (2023) tentang penerapan *good governance* dalam pelayanan publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, transparansi disebut juga keterbukaan. Keterbukaan ketika memberi informasi yang berkaitan dengan program mengelola sumber daya publik pada stakeholder. Kantor Bakesbangpol Kota Malang harus transparan kepada masyarakat sebab masyarakat harus mengetahui terkait informasi tentang pelayanan melalui pelayanan ormas (Si Ormas) dan melalui berita yang ditulis oleh wartawan, namun berdasarkan hasil analisis belum sepenuhnya menerapkan asas *good governance* menurut Peraturan Pemerintahan No 101 Tahun 2000 bahwa juga terdapat informasi yang tidak harus diketahui oleh publik. Jika dalam instansi tersebut juga terdapat permasalahan seperti terkadang terjadinya mis komunikasi informasi dari pihak atasan ke bawahan atau sebaliknya.

Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Penerapan Prinsip Partisipasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng tentang partisipasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, beliau mengatakan bahwa:

“Saya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai landasan demokrasi yang sehat dan efektif. Bahwa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan mendukung pemahaman yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Inisiatif dan program-program konkret yang telah diimplementasikan untuk mendorong partisipasi masyarakat, seperti rapat terbuka, konsultasi publik, atau forum partisipatif lainnya”. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imantari (2023) tentang penerapan *good governance* dalam pelayanan publik di badan kesatuan bangsa dan politik kota malang, partisipasi merupakan hak setiap masyarakat untuk memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung atau dengan diwakili instansi yang sah yang mewakili kepentingannya. Keikutsertaan masyarakat pada penarikan keputusan secara langsung atau tidak langsung, membuat kebijakan menjadi lebih dinamis. Kantor Bakesbangpol Kota Malang telah berusaha memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengungkapkan pendapat mereka melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidang. Misalnya, dalam Bidang POLDAGRI dan Ormas, masyarakat terlibat dalam bantuan partai politik dan pendidikan politik.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng tentang akuntabilitas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, beliau mengatakan bahwa:

“Saya menekankan pentingnya komitmen penuh terhadap prinsip akuntabilitas sebagai fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kebijakan dan tindakan yang diambilnya. Mekanisme akuntabilitas internal, seperti prosedur audit internal dan sistem pengawasan, untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan dan praktik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait transparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk penyediaan informasi keuangan kepada masyarakat dan pemantauan oleh instansi pengawas”. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imantari (2023) tentang penerapan *good governance* dalam Pelayanan Publik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi pemegang amanah guna memberi tanggungjawab, penyajian, mengungkapkan dan melaporkan semua kegiatan pemerintahan kepada pihak yang sudah memberi amanah yaitu masyarakat, oleh sebab itu, dalam hal ini instansi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat yang merupakan bentuk pertanggungjawaban penuh kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pada pelayanan publik di Badan Kesatuann Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng belum optimal karena beberapa indikator sepereti penerapan prinsip transparasi dalam keterbukaan informasi pelayanan publik belum dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sudah melaksanakan tugas dengan baik namun beberapa masukan dari responden perlu di perhatikan terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam melayani masyarakat perlu ditingkatkan kembali. Partisipasi Masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sudah berpartisipasi dengan baik, dengan demikian pengembangan sistem informasi terbuka yang mudah diakses memperluas keinginan masyarakat untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi atau kepentingan mereka. Keuangan sudah dengan baik namun beberapa masukan dari responden perlu pengembangan analisa jabatan dan keuangan akan memperkuat kebijakan prioritas anggaran dalam memberikan pelayanan dalam bantuan langsung kepada ormas. Peralatan masih membutuhkan peningkatan sarana infrastruktur dan pengembangan sistem layanan publik Badan Kessatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng lebih representatif dalam memberikan pelayanan. Organisasi dan Manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng sudah baik sesuai perencanaan namun perlu pengembangan terhadap pemenuhan dokumen standar pelayanan agar akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Barok Pratama, Arina Manasikana, N. A. F. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96. <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/view/120%0Ahttps://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/download/120/81>
- Agus Dwiyanto. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Issue 1). Gajah Mada University Press. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Arif, M. M. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Terhadap Penanganan Pengaduan Masyarakat Tentang Data Ganda pada Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18024>
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT.Rineka Cipta.
- Ayuningtyas, D. W. (2020). Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian. *Journal of Administration and International Development*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.52617/jaid.v1i1.223>
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (2023). Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, 63.
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). Tata Kelola Sektor Publik. In NBER Working Papers.

- <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Edinov, S., Taufik, T., Basri, Y. M., Indrawati, N., & Nur, E. (2022). Pengertian, Prinsip Dan Penerapan Good Governance Di Indonesia. In *Owner* (Vol. 6, Issue 4). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1192>
- Evi, P. (2012). Analisis Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Sukoharjo). In *Skripsi*. https://eprints.ums.ac.id/19940/2/3._BAB_I.pdf
- Fahrurroji & Tuti, R. (2020). Efektifitas badan kesatuan bangsa dan politik dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di kota tangerang selatan. *Gema Publica*, 5(1), 1–14.
- Haeli. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus). *Jurnal Bestari*, 1(1), 1–9.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1–10. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4932](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4932)
- Herdiawanto, H., Hamdayama, J., & Hayati, Y. S. (2010). *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Erlangga.
- Jatmiko, B., & Lestiawan, H. Y. (2016). Good governance government and the effect on local government performance (Survey on gunung kidul district government of Indonesia). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(14), 981–997.
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228. <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490>
- Laksana, M. Z. dan W. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. Pustaka Setia.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Vol. 28, Issue 2). Andi Offset.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Mojambo, G. A., Tulung, J. E., & Saerang, R. T. (2020). The Influence of Top Management Team (TMT) Characteristics Toward Indonesian Banks Financial Performance During the Digital Era (2014-2018). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(1).
- Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Factors Affecting Community Participation in the Implementation of Corporate Social Responsibility Program. *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 224–228.
- Nursalam. (2013). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis*. Salemba Medika. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2227%0A???%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3307%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.ph
- Oktavia, A. (2022). *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Analisis penerapan Good Governance terhadap pelayanan publik di Kantor Kecamatan Baturaja Barat*. 5(4), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Palangda, L., & Dame, J. M. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 1(2), 273–287. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i2.p273-287>
- Poltak Sinambela, L. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara.
- Prokomsetda. (2017). *Pengertian, Prinsip, dan Penerapan Good Governance di Indonesia*. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan. <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan>

good-governance-di-indonesia-99

- Putra, A. A. (2013). Kebijakan Disiplin Pegawai Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Administrasi Reform*, 1(1), 1–22.
- Ramendra, J., & Kurniawan, P. S. (2021). Evaluasi Penerapan Good Governance pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 127. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.28294>
- Rangkuti, F. (2015). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. In *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran* (Vol. 20). PT Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=D9_YDwAAQBAJ&pg=PA369&lpg=PA369&dq=Prawirohardjo,+Sarwono.+2010.+Buku+Acuan+Nasional+Pelayanan+Kesehatan++Maternal+dan+Neonatal.+Jakarta+:+PT+Bina+Pustaka+Sarwono+Prawirohardjo.&source=bl&ots=riWNmMFyEq&sig=ACfU3U0HyN3I
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(09), 1902–1908. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>
- Selamat, M. D. (2013). Penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). *Jurnal Governance*, 5(1), 5–24. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1558>
- Soejono, & Abdurrahman, H. (2005). *Metode penelitian : suatu pemikiran dan penerapan*. Rieneka Cipta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabet.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi penelitian bisnis dan ekonomi pendekatan kuantitatif*. Pustaka Baru Press.
- Sumatri, Z. B. P. (2018). Penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1), 1–15.
- Syam, S. M. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*. Universitas Hasanudin.
- Tawai, A., Muhammad Amir, & Almaidah. (2023). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 6(1), 343–354. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.126>
- Tompo, M., Madani, M., & Fatmawati, F. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Rsd Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.5320>
- Tomuka, S. (2012). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Triyanto, D., Purnawan, H., & Saputra, B. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Puskesmas Betungan Kota Bengkulu. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.33084/restorica.v7i1.1922>
- Yuanida, M. (2010). Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 191–195. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i4.2366>